

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Oemar Seno, 1981, *Herziening Ganti Rugi Suap Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta.
- Akbari, Anugerah, Rizki, Maidina Rahmawati, Adery Ardhan Saputro, Matheus Nathanael Siagian, Erasmus A. T. Napitupulu, Miko Susanto Ginting, Estu Dyah Arifianti, M. Tanziel Aziezi, Iftitahsari, Sustira Dirga, Lovina, dan Sri Bayuningsih Praptadina., 2022, *Audit KUHAP Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia*, ICJR, Jakarta.
- Ali, Mahrus 2021, *Viktimologi*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Anugerah Rizki Akbari, Lovina, , Sri Bayuningsih Praptadina, Tim Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021, *Studi Pemulihan Korban Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2017, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: Geen Straf Zonder Schuld*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2010, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fajar Mukti, & Yulianto, Achmad2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fuady, Munir 2005, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2013, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy OS 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka.
- Hiariej, Eddy OS, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.

- HS, Salim, 2017, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada. Depok.
- Huda, Ni'matul, 2018, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Kadafi, Binziad, 2023, *Peninjauan Kembali Koreksi Kesalahan Dalam Putusan*, KPG, Jakarta.
- Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020, Cetakan kelima, Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung, Jakarta.
- Kuffal, H.M.A, 2002, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang.
- Laksmiana, Gandjar, tanpa tahun, *Hukum dan Sistem Peradilan Pidana*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta
- M. Arief Mansur, Dikdik, Elsatri Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. Depok
- Mamudji, Soerjono Soekanto & Sri, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Manan, Munafrizal, 2012, *Penemuan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi*, Mandar Maju, Bandung.
- Martitah, 2013, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ngadino, Agus & Zulhidayat, "Gugatan dan Ganti Rugi Lingkungan", dalam Laode M. Syarif & Andri G. Wibisana, 2015, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*, Kemitraan Partnership, Jakarta
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siahaan, Maruarar, 2005, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Soeparman, Parman, 2007, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung
- Sudarto, 1990, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sunaryo, Sidik, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Sutiyoso, Bambang, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sutiyoso, Bambang, 2009, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta.

Waluyo, Bambang 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yahya, Bettina, Lilik Mulyadi, Budi Suhariyanto, 2019, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pidana*, Kencana, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

Fatahillah Akbar, Muhammad, “Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi di Bidang Pengujian Undang-Undang terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan Perubahan KUHP”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 3, September 2019,

M.Luthfi Chakim, "Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015.

Mulyadi, Lilik, “Upaya Hukum yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung RI, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2012.

Ni'matul Huda, “Problematisasi Pengaturan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 27, No 3, September 2020.

Ramdan, Ajie “Kewenangan Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XVI/2016, *JIKH*, Vol. 11 No. 2, Juli 2017.

Ridha, Muhammad, “Efektivitas Kasasi Demi Kepentingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Lex Renaisan*, Vol 6, Nomor 1, Januari 2021.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Aziezi, M. Tanziel, *et. al.*, 2019, Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia, *Kertas Kebijakan*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Jakarta.

Darmawan, Ristu, 2012, Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana, *Tesis*, Universitas Indonesia, Depok.

Hanafi Amrani & Afan Beni Arseno, 2016, “Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang: Analisis

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014”,
Laporan Penelitian Kolaborasi, Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia, Yogyakarta.

Mangasih, Timbul, 2016, Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara
Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, *Tesis*,
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Syukri Asy’ari, Mohammad Mahrus Ali Meyrinda Rahmawati Hilipito, 2013,
*Model Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian
Undang-Undang (Studi Putusan 2003-2012)*, Pusat Penelitian dan
Pengkajian Perkara Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Mahkamah Konstitusi RI.

D. Internet

Arsil, 2008, Dilema PK oleh Jaksa-Catatan Atas Putusan MA,
[https://krupukulit.com/2008/11/07/dilema-peninjauan-kembali-oleh-jaksa-
catatan-atas-putusan-ma/](https://krupukulit.com/2008/11/07/dilema-peninjauan-kembali-oleh-jaksa-catatan-atas-putusan-ma/)

Arsil, 2012, Daftar Putusan PK dimana Pemohon PK adalah Jaksa Penuntut Umum,
[https://krupukulit.com/2012/06/10/daftar-putusan-pk-dimana-pemohon-pk-
adalah-jaksa-penuntut-umum/](https://krupukulit.com/2012/06/10/daftar-putusan-pk-dimana-pemohon-pk-adalah-jaksa-penuntut-umum/)

Azizi, Tanziel, 2020, [https://kanggurumalas.com/2020/04/04/polemik-
perampasan-aset-first-travel-oleh-negara-pelajaran-penting-pemulihan-
kerugian-korban-yang-tidak-pernah-diperhatikan/](https://kanggurumalas.com/2020/04/04/polemik-perampasan-aset-first-travel-oleh-negara-pelajaran-penting-pemulihan-kerugian-korban-yang-tidak-pernah-diperhatikan/)

Hakim, Rakhmat Nur, 2016, “Jaksa Agung: Meski MK Nyatakan Tak Bisa, Kami
Tetap Ajukan PK”,
[https://nasional.kompas.com/read/2016/06/06/19043121/jaksa.agung.meski
.mk.nyatakan.tak](https://nasional.kompas.com/read/2016/06/06/19043121/jaksa.agung.meski.mk.nyatakan.tak).

Hariyanto, Ibnu, 2020, “PK soal Syafruddin Arsyad Temenggung Tak Diterima
MA, Ini Respons KPK”, [https://news.detik.com/berita/d-5119688/pk-soal-
syafuruddin-arsyad-temenggung-tak-diterima-ma-ini-respons-kpk](https://news.detik.com/berita/d-5119688/pk-soal-syafruddin-arsyad-temenggung-tak-diterima-ma-ini-respons-kpk).

Hukumonline, 2023, Imbas Putusan MA Kejaksaan diminta notifikasi jamaah first
travel, [https://www.hukumonline.com/berita/a/imbasputusanma-
kejaksaan-diminta-notifikasi-jamaah-first-travel-lt63bd370f905d3/?page=2](https://www.hukumonline.com/berita/a/imbasputusanma-kejaksaan-diminta-notifikasi-jamaah-first-travel-lt63bd370f905d3/?page=2)

ICW, 2009, Hak PK oleh Jaksa Perlu Diatur, [https://antikorupsi.org/id/article/hak-
peninjauan-kembali-oleh-jaksa-perlu-diatur](https://antikorupsi.org/id/article/hak-peninjauan-kembali-oleh-jaksa-perlu-diatur),

Kadafi, Binziad, 2022, “PK oleh Jaksa”,
[https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2045-
peninjauan-kembali-oleh-jaksa-binziad-kadafi](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2045-peninjauan-kembali-oleh-jaksa-binziad-kadafi).

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kejaksaan>.

Rachman, Ardito, 2020, “PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK, Masalah Baru dari Putusan MA Kembalikan Aset ke Jamaah”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/03/20073371/pk-perkara-syafruddin-arsyadtemenggung-ditolak-ma-ini-respons-kpk?page=all>.

Yuswa Kusumah, 2023, Komisi Kejaksaan Kritik Larangan Jaksa Ajukan PK, <https://komisi-kejaksaan.go.id/testing-beritaaa-3/>

E. Peraturan Perundang-Undangan / Keputusan

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1998.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1969.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1980.

Pertimbangan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1982 tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 Yang Disempurnakan.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 27 Tahun 2014 telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2020.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah Ketiga Kali dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

G. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia Nomor tentang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 13 Agustus 2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 12 Mei 2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanggal 3 April 2023;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pid/2007 perihal PK perkara Pollycarpus Budihari Priyanto, 25 Januari 2008.

Putusan No 12 PK/Pid.Sus/2009: Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 perihal PK perkara Joko Soegiarto Tjandra, 11 Juni 2009.

Putusan No 55 PK/Pid/1996: Putusan Mahkamah Agung 55 PK/Pid/1996 perihal PK perkara Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A., 25 Oktober 1996.

Putusan No 3 PK/Pid/2001: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 PK/Pid/2001 perihal PK perkara Ram Gulumal, 2 Agustus 2001.

Putusan No 15 PK/Pid/2006: Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 PK/Pid/2006 perihal PK perkara Soetiyawati, 19 Juni 2006.

Putusan No 84 PK/Pid/2006: Putusan Mahkamah Agung Nomor 84 PK/Pid/2006 perihal PK perkara Mulyar Bin Samsi, 18 Juli 2007.

Putusan No 152 PK/Pid/2010: Putusan Mahkamah Agung Nomor 152 PK/Pid/2010 perihal PK perkara Anggodo Widjojo, 7 Oktober 2010.

Putusan No 57 PK/Pid/2009 Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 PK/Pid/2009 perihal PK perkara Roedyanto, 31 Agustus 2009.

Putusan No 173 PK/Pid. Sus/2011: Putusan Mahkamah Agung Nomor 173 PK/Pid. Sus/2011 perihal PK perkara Ahmad Kurdi Moekri, 20 November 2012.

H. Konvensi Internasional

United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (UNJVC).

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).